

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

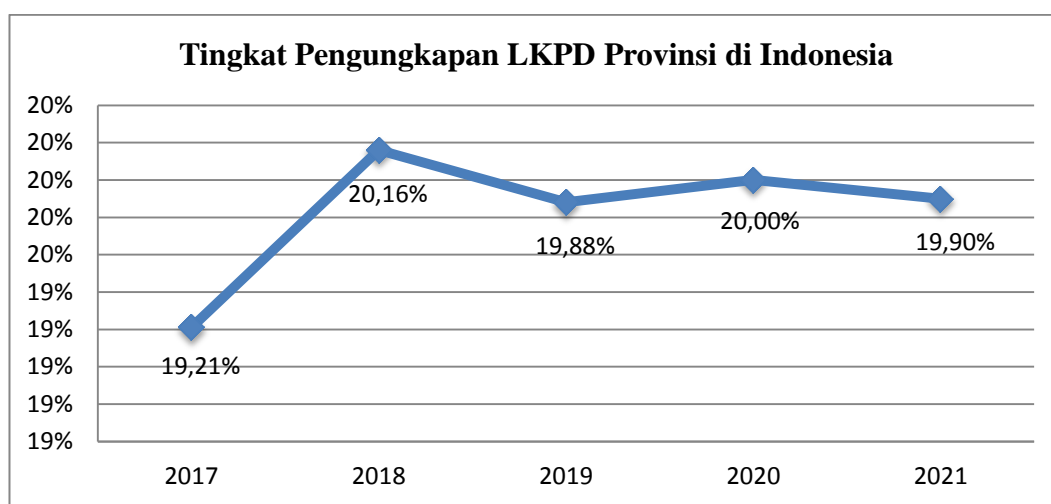
### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan otonomi daerah pada saat ini mencerminkan adanya respon masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Negara akan terkait erat dengan masalah akuntabilitas dan transparansi khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena keuangan Negara menduduki posisi strategis guna mendukung pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah serta pengaruhnya pada kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah wajib secara terus menerus melakukan upaya perbaikan atas aspek transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah mencakup aspek teknis khususnya dalam hal peraturan, kelembagaan sistem informasi keuangan, serta peningkatan kualitas sumber daya (Mokoginta, Lambey, dan Pontoh 2021)

Salah satu komponen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan adalah pengungkapan laporan keuangan. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengungkapan laporan keuangan terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 (Putri, Meiliza, and Arza 2019). Transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah terwujud melalui penyampaian informasi laporan finansial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pemerintah daerah wajib melakukan pengungkapan lengkap. Pengungkapan lengkap diwujudkan dengan penyajian semua data-data penting bagi pemakai laporan keuangan, baik yang disampaikan lembar awal laporan keuangan, maupun pada Catatan atas Laporan Keuangan (Finakesti, dkk 2022).

Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang tinggi akan memberikan manfaat yang besar, antara lain meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta dengan menyajikan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang dibuat Pemerintah daerah setidaknya meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Utami, Ramadhia, dan Sulardi 2020). Berikut adalah tingkat pengungkapan rata-rata laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia



**Sumber : Data yang telah diolah (2023)**

**Gambar 1.1**

### **Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan yang disajikan pada gambar 1.1 pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dari tahun 2017 senilai 19,21% dan menaik di tahun 2018 sebesar 20,16%, pada tahun 2019 mengalami penurunan senilai 19,88% lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan senilai 20,00%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi senilai 19,90%. Dari tahun 2017-2021 yang tertinggi tingkat pengungkapannya di tahun 2018 dengan persenan sebesar 20,16% dan terendah pada tahun 2017 dengan persenan senilai 19,21%.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tingkat pengungkapan LKPD terhadap SAP dengan hasil yang berbeda-beda. (Utami, Ramadhia, dan Sulardi 2020) mengungkapkan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/ kota di Indonesia sebesar 60,42%. Dengan faktor pengungkapannya ialah Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Rasio

Kemandirian. variabel karakteristik pemerintah daerah yang terdiri atas populasi dan IPM berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan laporan keuangan, sedangkan variabel opini audit dan rasio kemandirian daerah tidak memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

(Kusuma, dan Aswar 2021) mengungkapkan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD di pulau Jawa sebesar 80,58%. Dengan faktor pengungkapannya ialah legislatif size, local government budget expenditure, audit finding, dan local government size. Legislatif size berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Local government budget expenditure, audit finding, dan local government size tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

(Kurniawati, Devita, dan Sarwono 2018) mengungkapkan rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan di Jawa Tengah sebesar 50,77%. Dengan faktor pengungkapannya ialah Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Kekayaan daerah merupakan kinerja pemerintah sebagaimana ditunjukkan kemakmuran daerah atau jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kurniawati, Devita, dan Sarwono 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD. Menurut (Kurniawati, Devita, dan Sarwono 2018) kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. (Salfadhilah, Sumardjo, dan Wijaya 2021) menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. berbeda dengan penelitian (Putri, Meiliza, dan Arza 2019) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan merupakan besarnya kemampuan yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah (Finakesti, dkk 2022). Menurut (Sheldy, Ricky, dan Setiawan 2020) menyatakan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. (Rafida, dkk 2019) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berbeda dengan penelitian (Nur, dan Murwaningsari 2020) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan terhadap laporan keuangan pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan berpengaruh terhadap pemberian opini oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan (Rahmi, Maulidya, dan Ariani 2021). Menurut (Soleman, Pontoh, & Budiarmo 2019) menyatakan bahwa temuan audit mempengaruhi secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. (Fuadi, dan Asmara 2020) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif atas tingkat pengungkapan LKPD. (Azahari dan Sulardi 2021) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Oleh karena ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait tingkat pengungkapan LKPD serta faktor yang mempengaruhinya, dan perbedaan basis akuntansi yang digunakan, penulis tertarik menganalisa lebih dalam permasalahan tersebut dengan menggunakan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh, yaitu Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Dan Temuan Audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama dalam penelitian ini menggunakan butir checklist yang dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target peraturan daerah APBD; ikhtisar pencapaian kinerja

keuangan selama tahun pelaporan; dasar penyajian laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan, dan penjelasan setiap pos pada laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas); pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; pengungkapan-pengungkapan lainnya. Perbedaan yang kedua yaitu periode LKPD yang digunakan adalah tahun anggaran 2017-2021. Perbedaan yang ketiga, yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia ?
2. Apakah Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia ?
3. Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia ?
4. Apakah Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, dan Temuan Audit berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan serta analisis yang terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan temuan audit yang terdiri dari hasil pemeriksaan

kelemasan SPI dan kepatuhan terhadap perundang - undangan terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia tahun 2017-2021.

Dengan membatasi masalah pada hal-hal tersebut, penelitian dapat lebih terfokus dan dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan akurat terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (LKPD) Di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, dan Temuan Audit secara simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Menambah bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga ilmu akuntansi sektor publik akan semakin berkembang.
2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai sarana dalam memahami, serta menambah pengetahuan untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari.

3. Bagi pemerintahan daerah, diharapkan penelitian ini berkontribusi untuk lebih mengoptimalkan penyusunan LKPD yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.